

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2022/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ABDULLAH KAWULUSAN**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS PANGAN**
3. NHK : **681760**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**Rp. **1.570.000.000**

1. Tanah Seluas 1976 m2 di KAB / KOTA BUOL, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 351 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah Seluas 18000 m2 di KAB / KOTA BUOL, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. Tanah Seluas 765 m2 di KAB / KOTA BUOL, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
5. Tanah Seluas 10200 m2 di KAB / KOTA BUOL, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
6. Tanah Seluas 100000 m2 di KAB / KOTA BUOL, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 528 m2/286 m2 di KAB / KOTA SIGI, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 207 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESINRp. **230.000.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000



2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI
Rp. 1.000.000
3. MOBIL, NISSAN JUKE MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
200.000.000
4. MOBIL, SUZUKI KATANA JEEP Tahun 1900, HASIL SENDIRI Rp.
23.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	11.750.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	315.601.465
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	2.127.351.465
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.127.351.465

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.